



Media: Merapi

Hari: Senin

Tanggal: 27 Juli 2026

Halaman: 2

TERAS

Pedestrian Malioboro

RENCANA pedestrian penuh di kawasan Malioboro terus dimatangkan. Peningkatan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X bahwa kawasan ikonik tersebut tidak sepenuhnya standi dari kendaraan logistik memberikan angin segar bagi ekosistem bisnis lokal. Langkah ini menunjukkan spirit penataan ruang publik di jantung Kota Yogyakarta tetap mempertimbangkan denyut nadi perekonomian kawasan yang bergantung pada kelancaran suplai barang perhotelan dan perhotelan.

Kunci keberhasilan transisi Malioboro menuju kawasan pejalan kaki yang humanis terletak pada presisi regulasi dan keterlibatan masyarakat pendukung. Kehadiran ruang bebas kendaraan akan menjadi sia-sia jika persoalan klasik seperti kesemrawutan becak motor yang menyebarkan asap tempat andong hingga meluapnya parkir liar di bahu jalan masih terus diabaikan. Penataan Malioboro sejatinya bukan sekadar pengalihan moda transportasi, melainkan sebuah khir reformasi kultur ketertarikan umum agar ikon wisata budaya ini tidak berujung pada, kumuh, dan terdistorsi fungsinya.

Perubahan status Malioboro dari arteri jalan utama menjadi zona pedestrian secara otomatis mengubah lanskap sirkulasi lalu lintas secara mendasar. Beban mobilitas kendaraan kini berpindah penuh ke jalan-jalan sirip penghubung, seperti Jalan Dagen, Pajeksan, dan sekitarnya. Konsekuensi logis dari pergeseran arus ini adalah melonjaknya kebutuhan kantong-kantong parkir baru di kawasan penyangga. Penataan ruang ini membutuhkan sinergi adaptif bersama masyarakat dan sektor swasta melalui optimalisasi lahan-lahan potensial di sekitar koridor utama.

Pemerintah Kota Yogyakarta merespons cepat instruksi Pemda DIY melalui pembentukan tim pengkaji di sepuluh ruas jalan sirip Malioboro. Pendekatan spesifik per ruas jalan ini sangat krusial mengingat setiap sirip memiliki dinamika sosio-ekonomi dan karakteristik fisik yang berbeda, mulai dari lebar jalan untuk memutar arah kendaraan, mitigasi pedagang kaki lima, hingga kesediaan kantong parkir lokal. Pendekatan berbasis pemetaan komprehensif ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang presisi. ***

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005